



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PILKADA  
KOMISI II DPR RI KE KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021  
TANGGAL 23 November 2020**

---

### **I. Pengantar**

Kunjungan Kerja Spesifik Pilkada Masa persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ini merupakan hasil keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 10 November 2020. Dalam rapat tersebut Komisi II DPR RI pada Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan II tahun sidang 2020-2021 akan melakukan Kunjungan Kerja ke 3 (tiga) daerah, yang akan dilaksanakan tanggal 23-25 November 2020, dimana salah satu daerah yang menjadi tujuan adalah Kota Makassar.

Dalam Kunker Spesifik di Kota Makassar tersebut Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Walikota Makassar. Pada acara yang dilaksanakan di Kantor Walikota Makassar tersebut, Tim Kunker Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan pihak Pemerintah Kota Makassar, yaitu Pj. Walikota Makassar dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar, Ketua KPU Sulawesi Selatan beserta KPU Kota Makassar, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan beserta Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dandimtabes Makassar, Kajari Makassar, dan Wakapolrestabes Makassar, dan utusan dari K/L mitra kerja Komisi II DPR RI.

### **II. HASIL KUNJUNGAN**

Rombongan diterima langsung oleh Pj. Walikota Makassar Prof. Dr. Ir. Rudy Djamaluddin, MT, Kepala OPD terkait, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta KPU Kota Makassar, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan beserta Bawaslu Kota Makassar, Dandimtabes Makassar, Kajari Makassar, dan Wakapolrestabes Makassar. Pertemuan tersebut berlangsung sejak pk 09.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Utama Walikota Makassar. Pertemuan tersebut diawali dengan kata pengantar oleh Ketua Tim H. Arwani Thomafi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan kemudian dilanjutkan oleh pemaparan oleh Pj Walikota Makassar, KPU Sulawesi Selatan dan KPU Kota Makassar, Bawaslu Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kota Makassar.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik H. Arwani Thomafi menyampaikan bahwa Kunjungan ini adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap, tentang perkembangan persiapan pilkada serentak 2020. Komisi II memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas penyambutan yang ramah dan baik. Selanjutnya Ketua memperkenalkan anggota tim Kunspek Komisi II DPR RI sebagai berikut :

NO	NO Anggota	NAMA	KETERANGAN
1	A-467	H. Moh. Arwani Thomafi	Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II/F-PPP
2	A-263	Komaruddin Watubun, SH, MH	Anggota/F-PDI-P
3	A-240	Drs. Cornelis, MH.	Anggota/F-PDI-P
4	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/F-Gerindra
5	A-384	M. Syamsul Lutfi, SE	Anggota/F-Nasdem
6	A-30	H. Sukamto, SH	Anggota/F-PKB
7	A-541	H. Muhammad Muraz, MM	Anggota/F-Demokrat
8	A-428	Teddy Setiadi, S. IKom	Anggota/F-PKS
9	A-520	John Siffy Mirin	Anggota/F-PAN
9	A-462	Dr, H.Syamsurizal, SE, MM	Anggota/F-PPP

Perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI.

#### **A. Pemaparan-pemaparan**

##### **1. Walikota Makassar Prof. Dr. Ir. Rudy Djamaluddin, MT.**

Alhamdulillah dengan bantuan dan kerjasama seluruh pihak dari para ulama, imam masjid, para ketua RT dan RW dan Forkopimda, maka Kota Makassar telah keluar dari zona merah dan sekarang oleh satgas covid 19 kita dah masuk masuk zona oranye. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Anggota Komisi II DPR RI yang telah menjadikan Kota Makasar menjadi salah satu tempat untuk melihat secara langsung persiapan Pilkada serentak th 2020.

Persiapan Pilkada Serentak th 2020 telah memasuki berbagai tahapan sesuai dengan harapan, meski ada beberapa catatan seperti adanya kerumuman ketika masa pendaftaran calon. Kemudian ada di Jakarta dimana pendukung salah satu calon menciderai pendukung calon lain. Tetapi secara umum, persiapan pilkada sudah cukup baik, hal tersebut adalah kerja keras KPU Kota Makassar dibawah bimbingan KPU Prov Sulawesi Selatan.

Mohon masukan arahan agar pilkada di Kota makasar dapat berjalan secara baik seiring dengan adanya pandemi covid. Atas dukungan dari Komisi II khususnya pembangunan Kota Makassar sebagai gerbang di Indonesia Timur. Tentu Makasar sebagai kota besar di Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi nasional. Kami bersyukur makasar roda ekonominya berlangsung secara baik, dan hal tersebut

berimbang pada serapan anggaran karena kami juga harus bersyukur perkembangan ekonomi di Makassar jauh lebih baik dari kota-kota lain di Indonesia.

Yang terakhir, kami mohon atas segala kekurangan dalam penyambutan dan semoga tugas kerja kunspek bisa berlangsung secara baik dan bermanfaat untuk kita semua.

## 2. KPU Provinsi Sulawesi Selatan Faisal Amir

Dalam pilkada serentak kali ini di Sulawesi Selatan ada 12 kab/kota melaksanakan pilkada, dua diantaranya antara bupati dengan wakil bupati bertarung. Dan 4 calon ada di Makassar, Bulukumba dan Pangkep. Ada kab/kota yang ada calon tunggal yaitu Soppeng dan Gowa. Meski berjalan dengan lancar. Tapi tentu ada dinamika yang berbeda dari calon-calon sebelumnya. Misalnya terkait protokol covid, ada calon dari Luwu dan Luwu Timur yang positif covid, sehingga dilakukan isolasi mandiri. Baru setelah negatif ditetapkan sebagai calon. Dari tahapan pilkada, dalam pendaftaran calon kita mendapatkan fenomena dimana protokol covid terabaikan. Ketika itu hanya satu calon yang mendaftar tidak membawa massa. Tetapi dalam masalah protokol covid mereka tertib di wilayah yang diatur oleh KPU, yang menjadi masalah di luar wilayah yang diatur oleh KPU karena tidak sesuai protokol kesehatan.

Dari perkembangan tahapan penyelenggara di tingkat pimpinan KPU diharuskan test swab. Dan memang kenyataannya ada komisioner yang positif. Ditingkat KPU provinsi ada 3 orang komisioner yang positif, sementara di tingkat staf, ada 6 orang positif covid, dan setelah menjalani perawatan sekarang sudah sehat.

Terkait dengan protokol covid, yang menjadi masalah selanjutnya adalah dalam perekrutan KPPS. Karena banyak calon KPPS yang tidak mau untuk rapid tes. Sehingga menjadi masalah di lapangan. Sehingga beberapa Kab/kota masih terkendala dalam perekrutan karena ada yang mundur ketika akan rapid test. Atau ada yang mundur ketika dirapid dan swab ternyata positif covid.

Salah satu kendala, pilkada semakin bertambah anggaran dan juga merepotkan karena bertambah logistik. Logistik APD, kendala kami karena kami biasa tidak melaksanakan pengadaan APD. Dan banyak rekan yang baru kenal seperti apa APD. Ada juga yang masih bingung apa itu rapid tes apa itu swab tes dan juga apa itu APD. Dan pengadaannya itu yang membikin repot karena waktunya terlalu singkat. Sebagai contoh kami diberi anggaran APD, dan untuk rapid atau swab tes, tapi ada beberapa kab/kota tidak semua mampu menyiapkan untuk tes rapid, kami kesulitan. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 kab/kota dinas kesehatan yang tidak siap untuk pengadaan rapid tes. Demikian juga Kota Makassar juga dinas kesehatannya tidak bersedia, tapi karena di sini banyak klinik dan banyak laboratorium maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Tapi untuk daerah-daerah yang jauh dari sini jadi masalah. Seperti misalnya di Bulukumba yang dinas kesehatannya tidak bersedia mengadakan maka KPU setempat mengadakan alat-alat tes tersebut bekerjasama dengan klinik-klinik yang ada di Kota Makassar. Sehingga sebuah klinik di Makassar melakukan rapid tes di Bulukumba. Secara umum pengadaan semua itu bisa dilaksanakan meski kami cukup was-was dalam pelaksanaan.

Sekarang kami sedang berjibaku dalam logistik, baik logistik calon, TPS, dan APD. Kendala kami dalam protokol covid, adalah dalam pembagian logistik karena harus melibatkan 100 sd 200 orang. Untuk mensortir logistik karena sekarang 14 hari sebelum hari H. Alhamdulillah Kota Makassar menyediakan Gedung Triple C untuk sortir logistik hal tersebut penting karena dalam sortir logistik itu harus memperhatikan protokol covid. Kami butuh dukungan dari Pemkot Makassar untuk terlibat sebagai pemantau. Kami biasanya melibatkan mahasiswa sebagai pemantau karena petugas

sortir ada 100 sd 300 orang. Sortir tersebut selain APD juga logistis TPS. Di Makassar ada 2.300 TPS dimana setiap TPS membutuhkan 4(empat) ember sesuai dengan protokol covid, belum lagi logistik yang lain yang harus dipacking. Melihat kondisi tersebut akan mendorong terjadinya kerumunan. Sehingga diperlukan pemantauan dari kita semua.

Pelibatan pemantau penting, yang kadang menjadi persoalan apakah pemantau juga perlu tes rapid atau tidak. Karena saya punya pengalaman dimana saya pernah bekerja dengan orang yang covid 19 tapi saya tidak tertular. Hal itu terjadi karena saya disiplin protokol covid. Jadi menurut saya, disiplin protokol covid merupakan hal mutlak untuk menjaga kesehatan.

Dalam kondisi musim hujan, ada masalah pada dua daerah yakni Kab Selayar dan Kab. Pangkep. Karena ada TPS di Pangkep yang lebih dekat ke NTB. Sementara itu, ada beberapa TPS di Kab Selayar yang lebih dekat dengan NTT. Selama ini kalau ada teman-teman KPU setempat mau menyupervisi di tempat-tempat tersebut harus ke NTT atau NTB dulu.

Di musim hujan ini juga kadang tidak memungkinkan kapal berlayar. Sehingga berpengaruh pada distribusi logistik. Pengalaman pilkada yang lalu, kami mendapatkan bantuan dari TNI-Polri untuk mendistribusikan logistik menggunakan helikopter. Semoga dalam pilkada kali ini hal tersebut dapat dilakukan. Kita tentu menyiapkan skenario terburuk. Karena bagaimanapun pilkada harus terlaksana pada 9 Desember 2020 dan hal tersebut tidak bisa ditawar-tawar maka kami harus siap dengan segala keadaan.

Kami berterimakasih atas anggaran yang menunjang kegiatan seperti ada vitamin dsb. Selain itu kami memandang sepanjang kegiatan yang kami lakukan tidak diatur oleh perundang-undangan maka tidak bisa dipidanakan dan paling jauh peraturan KPU mengatur tentang pelanggaran administrasi.

### 3. KPU Makasar Farid Wajdi

Yang membuat kami kurang fokus dalam tahapan pilkada sekarang adalah siklus keuangan negara. Karena bulan desember ada pemeriksaan dari inspektorat dan BPK secara reguler. Tanggal 3 desember, BPK insyaAllah akan masuk kembali ke KPU Kota Makasar. Pada saat bersamaan, tanggal tersebut adalah masa yang paling agresif dalam pelaksanaan tahapan. Setidak-tidaknya persiapan menyiapkan laporan untuk pemeriksaan BPK akan mengganggu persiapan hal-hal teknis. Meskipun begitu kami tetap siap mengadakan pilkada di Kota Makassar.

Kami laporkan, kami sedang melakukan sortir lipat di Gedung Triple C, setelah surat suara kami terima dua hari yang lalu. Setelah itu akan kami simulasi lipat melibatkan 50 orang, untuk memastikan protokol kesehatan. Kami pastikan protokol kesehatan tetap terjaga. Karena tempat kita menyortir itu kapasitasnya 10.000, tapi karena pak Ketua KPU Sulsel meminta kami untuk menjaga protokol kesehatan maka hanya diisi ratusan orang. Sehingga orang yang berada diruangan nantinya antara 400 – 500 orang saja. Untuk menegaskan bahwa protokol kesehatan berlangsung secara baik. Sebagaimana perintah regulasi yang harus ditegakkan.

Selanjutnya kami laporkan, tahap ke II debat calon dilakukan di Jakarta. Beberapa waktu lalu ada yang bertanya mengapa debat dilaksanakan di Jakarta? Maka kami perlu laporkan dalam forum ini, bahwa debat tidak dipindahkan ke Jakarta. Akan tetapi pelaksanaannya saja dipindahkan ke Jakarta. Karena ini terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang kami kelola. Selain itu, pilkada kota Makassar

mempunyai sensitifitas tinggi karena merupakan pilkada ulang. Karena seharusnya pilkada tahun 2018 lalu mampu memilih walikota definitif, ternyata tidak bisa. Dan kemudian diulang pada pilkada sekarang. Sehingga karena pilkada ini menarik atensi nasional maka kami harus bermitra dengan TV yang bisa disiarkan nasional. Untuk itu perlu diikuti dengan pengadaan barang dan jasa sesuai perpres NO 16, sehingga akan lebih murah dilaksanakan di Jakarta. Selain itu kami juga mengevaluasi penegakkan protokol covid dalam masa tahapan yang telah berlangsung seperti pendaftaran yang lalu. Kami melihat seperti yang disampaikan pak Walikota, bahwa yang di dalam wilayah KPU kami bisa tegakkan disiplin akan tetapi yang diluar wilayah KPU kami tidak bisa amankan. Untuk itu melakukan debat diluar tempat itu untuk mengurangi resiko adanya meningkatnya serangan covid akibat pilkada.

Saat ini logistik sudah kami terima sebagian, dan akan kita sortir dan selanjutnya akan kami distribusikan. Karena ada beberapa kecamatan yang berada di kepulauan.

Adapun dengan pertanyaan terkait protokol kesehatan dalam pilkada kami laporkan pada kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Makasar, baik itu sosialisasi atau bimtek kita telah melakukan upaya agar protokol kesehatan betul-betul terlaksana. 90% sosialisasi lewat virtual, itulah cara kita mematuhi protokol kesehatan. Kita juga terbantu peraturan walikota yang telah membantu kami untuk mencegah kerumunan pada saat tahapan pilkada.

Kami bersyukur kami dapat mengendalikan pada dua momen yang besar, kami bisa mengontrol pelanggaran protokol kesehatan. Pertama ketika pada saat penetapan pasangan calon. Dimana yang kita undang adalah LO pasangan calon, kemudian pada saat pengundian nomor urut. Itu semua terjadi karena kita belajar dari pendaftaran calon dimana massa membludak di luar kantor KPU Kota Makasar dan kami tidak bisa mengontrol. Sehingga pada saat penetapan dan pengundian nomor kita bisa melakukan langkah preventif, dan alhamdulillah dipatuhi oleh pasangan calon.

Terkait dengan yang disampaikan pak Ketua KPU Sulsel, ada TPS yang kami sediakan di rutan di 3 dan 1 TPS di lapas. Karena ada putusan yang sudah inkrah, maka kami siapkan TPS-TPS di bisa kami siapkan.

Oleh karena itu, sejak awal kami sampaikan bahwa jumlah TPS di Kota Makasar berjumlah 2.390 ditambah di lapas dan rutan. Kami berharap tidak ada lagi dalam DPT bermasalah, seperti ada orang yang sudah mati kemudian diundang untuk milih. Karena petugas PPDP kami telah melakukan pemutakhiran data dengan kondisi yang tidak mudah, berdasarkan DPT yang kami terima berjenjang dari Kemendagri, kemudian dilakukan pemutakhiran ada 1 juta lebih. Setelah dilakukan coklit maka ada data yang tidak terkonsolidasi. Outputnya adalah DPS dibawah 900 ribu. Oleh karena itu kami melakukan pemutakhiran data, sehingga DPT yang ditetapkan bulan Oktober 2020 berjumlah 901.000. Karena angka ini menjadi dasar regulatif berdasarkan pasal 80 UU pemilu. Sebagai proyeksi pencetakan surat suara. Sehingga jumlah surat suara yang akan dicetak adalah DPT ditambah DPT x 2,5%. Sedangkan pada pemilu terakhir jumlah DPT plus DPK adalah 1.042.000. Sementara data sekarang jumlah DPT kita plus DPK kita masih dibawah satu juta atau sejumlah 924.171. Kami ingin memberikan gambaran kepada bapak-bapak sekalian bahwa Kalau jumlah pemilih belum terekam itu ternyata berbeda dengan pemilu terakhir maka ada selisih 7, 2 % sementara secara regulasi hanya membolehkan 2,5% dari DPT. Ini terjadi karena ketika coklit Makasar tempat perkumpulan, banyak kampus, sekolah. Maka ketika pandemi ini banyak yang pulang kampung, karena kampus dilakukan dengan daring. Jadi tempat kos-kosan mahasiswa pulang kampung, sehingga sebagian tidak bisa

diidentifikasi kita proses cokolit. Terlepas itu semua, kami siap melaksanakan pilkada Kota Makassar dengan bantuan dan dukungan seluruh stakeholder di Kota Makassar.

Bawaslu Sulawesi Selatan Dalam Pilkada serentak 9 Des 2020 mendapat perhatian kami adalah tidak cukupnya surat suara. Hal itu terjadi karena adanya pemilih menggunakan KTP el yang datang ketika hari pemungutan suara. Hal ini tidak saja terjadi kali ini, tapi juga terjadi pada pemilu yang lalu. Untuk itu perlu antisipasi dari kita semua.

Mengenai pengawasan logistik, kami sedang mengawasi perjalanan logistik dari percetakan-percetakan yang ditunjuk yang tersebar di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami ada yang *stay* di pelabuhan-pelabuhan dan gudang-gudang. Laporan terakhir tidak ada kendala dan dalam distribusi serta dalam pengawalan pihak keamanan.

Protokol kesehatan, dalam pilkada kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada walikota dan forkopimda yang telah berusaha keras menyiapkan segalanya karena Makassar adalah salah satu episentrum covid di Indonesia. Semoga pilkada tidak menjadi klaster baru covid 19. Dengan kesadaran kita semua untuk bersama untuk mengawasi tahapan pilkada bersama pokja covid yang menjadi tanggung jawab kami.

Dalam penyelenggaraan pilkada kali ini seluruh pengawas kami berjumlah 11.705 orang. Sehingga untuk mengawasi pilkada di seluruh Sulsel bukanlah hal yang mudah. Tapi meski demikian, kami saat ini telah menangani 206 pelanggaran, 260 temuan, dan 86 laporan. Dari sekian jumlah pelanggaran yang kami ditangani, ada satu kabupaten belum ada pelanggaran yakni Kabupaten Soppeng, termasuk tidak adanya pelanggaran covid.

Terkait pelanggaran covid ini, bahwa sampai hari ini belum melakukan pembubaran kerumunan. Karena semua kandidat patuh pada pengawas pemilu. Termasuk surat peringatan yang disampaikan oleh pengawas pemilu. Ada 43 dugaan pelanggaran covid, tapi seluruh laporan tersebut pemeriksaannya dihentikan, karena semua paslon mematuhi surat peringatan yang kami layangkan. Sehingga sampai saat ini tidak ada pembubaran oleh pokja covid dalam tahapan-tahapan pemilu.

Terkait dengan si rekap, kami berterimakasih kepada Komisi II DPR yang menjadikan e rekap sebagai kontrol hitung manual. Oleh karenanya, kami meminta pada penyelenggara pilkada untuk mendahulukan yang manual sebagai patokan utama dengan didampingi si rekap

Potensi pelanggaran covid menjelang akhir kampanye akan meningkat, tapi kami tetap mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran. Dan setelah itu kami akan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara.

Kami juga mewaspadaai adanya pemilih ganda, yang memilih lebih dari satu kali. Karena hal tersebut bisa berdampak adanya pemilu ulang. Dan ini menjadi keprihatinan kalau sampai hal itu terjadi. Kami akan meminta pada Bawaslu kab/kota untuk mengawasi KPPS 4 dan 5 yang menyeleksi masuknya pemilih ke bilik TPS.

Selain itu kami juga mewaspadaai potensi penghilangan hak pilih karena covid, kami akan mewaspadaai di TPS-TPS, dimana KPPS tidak memberikan hak suara kepada orang yang terinfeksi covid. Selain itu kami juga mewaspadaai penggunaan C6. Karena distribusi C6 yang diberikan pada orang-orang yang diyakini akan memilih calonnya. Ini persoalan netralitas penyelenggara di tingkat KPPS kami akan mengantisipasi. Karena sekalipun C6 bukan undangan, tapi orang bugis dan makassar kadang enggan

ke TPS bila tidak memiliki C6. Kami akan menyosialisasikan masalah C6 ini kepada KPU Sulsel agar masyarakat dapat memahaminya secara baik.

Kendala, kami masih klasik, yaitu ada perubahan hasil. Hal tersebut menjadi atensi kami, terakhir kami mengucapkan terimakasih bahwa pelaporan pelanggaran 3 plus 2, paling tidak kemarin Komisi II DPR RI telah menyetujui fase pemeriksaan pendahuluan. Dan hal tersebut kami lebih leluasa untuk menyaring laporan yang masuk untuk di proses.

Untuk Sentra Gakumdu, masih terjadi perbedaan tafsir pasal jadwal kampanye, regeling atau putusan KPU yang ditetapkan oleh Kab/Kota. Selain itu ada tersangka tindak pidana pemilu yang melarikan diri. Karena ada perbedaan UU No 7 pilkada dan UU no 10 tentang pemilu, yang mana ada dalam UU pemilu ada pengadilan inabsentia sementara di pilkada tidak ada. Cuma memang pengalaman di tahun 2017 lalu, salah satunya untuk mengantisipasi agar tersangka tidak melarikan diri, maka Sentra Gakumdu melakukan penahanan terhadap tersangka.

Kendala klasik, juga terkait masalah geografis terutama kecamatan yang ada di kepulauan. Karena Sentra Gakumdu ada di kabupaten, sementara pelanggaran bisa saja terjadi di kecamatan di kepulauan. Hal ini membutuhkan kesepahaman unsur-unsur yang ada di Sentra Gakumdu.

Kami di Sulsel sampai saat ini ada pengaduan pelanggaran pemilu sebanyak 119 tindak pidana pemilu. Ada 89 laporan yang dihentikan dan sedang yang meningkat ke penyidikan 9 buah laporan. Sementara baru saja laporan yang meningkat ke penyidikan 11 laporan. Namun, ada 3 penyidikan yang di SP3 kan karena tersangkanya lari. Ada 2 laporan yang sampai ke penuntutan yakni di Bulukumba dan Selayar.

Selain itu kami menemukan ada laporan yang berhenti pada laporan awal, ini akan menjadi supervisi kami. Karena seharusnya tidak perlu ada penghentian pemeriksaan. Sampai saat ini ada 5 laporan terhenti.

#### 4. Bawaslu Kota Makasar Nursari, SH, MH.

Terkait protokol covid 19, Bawaslu telah melayangkan 7 peringatan kepada pasangan calon, dan sejauh ini pasangan calon secara suka rela membubarkan diri. Dalam proses pengawasan kami memang ada laporan intimidasi terhadap pengawas kami. Meski terjadi intimidasi, tapi akhirnya paslon patuh dan kemudian membubarkan diri.

Dengan adanya personil yang terbatas dan fakta pengawas kami mendapat intimidasi. Untuk itu kami harapkan hal ini menjadi atensi bapak-bapak sekalian. Agar perlu adanya aturan yang menjelaskan kedudukan pengawas yang mendapat intimidasi ketika melakukan pengawasan.

#### 5. Ketua Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari, SH, MH.

Keterlibatan kejaksaan dalam pilkada posisinya dalam Sentra Gakumdu. Kami sebagai penuntut umum kalau ada perkara sampai ke penuntutan. Sebagaimana disampaikan Bawaslu. Dalam pembahasan Bawaslu dalam Sentra Gakumdu telah dibicarakan tentang laporan yang masuk dalam tahapan-tahapan pilkada. Kemudian akan dibicarakan apakah laporan tersebut memenuhi syarat-syarat dan sudah sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan. Sejauh ini ada laporan yang masuk dalam klarifikasi dan ada satu yang sampai ke penyidikan, tapi keberlanjutan dari penyidikan tersebut tampaknya menjadi persoalan karena pihak yang dipersangkakan dalam penyidikan belum memenuhi panggilan oleh penyidik. Sementara berkas sudah sampai

ke kami dan kemudian kami meneliti ada berkas yang belum lengkap secara formil dan materiil untuk disidangkan di pengadilan. Maka berkas tersebut kami kembalikan ke penyidik dengan format P 19, dengan beberapa petunjuk baik formil maupun materiil. Karena keterbatasan waktu 3 hari untuk memenuhi persyaratan akhirnya teman-teman penyidik kesulitan juga untuk memenuhinya. Karena pihak calon tersangka tidak hadir memenuhi panggilan. Sehingga tidak bisa di BAP. Karena waktu perbaikan hanya 3 hari maka laporan tersebut kedaluarsa. Nah sekarang berkas-berkas termasuk SPDP sudah kami kembalikan karena sudah ada pernyataan penghentian penyidikan oleh penyidik. Sehingga perkara tersebut yang sudah diregister akan ditutup.

6. Dandimtabes Makassar Kol. Kav. Dwi Irbaya Candra, S.Sos

Mewakili institusi TNI, sepanjang pelaksanaan pilkada untuk berkoordinasi secara terus-menerus dengan seluruh instansi. Bahwa pilkada kali ini suasananya masih dalam masa covid, demikian juga sebagaimana pelibatan kami selalu bersama dengan Polri, KPU dan Bawaslu. Forkominda saat ini dalam suasana pilkada ditambah KPU dan Bawaslu karena kami ingin pilkada serentak 2020 ini berjalan lancar.

Di awal-awal kami mendorong seluruh paslon mematuhi protokol kesehatan, karena bagaimanapun Makassar adalah representasi Sulawesi Selatan, apalagi kita pernah menduduki peringkat 3 dalam covid 19. Kemudian turun ke ranking 5, dan sekarang beranjak ke zona oranye. Semoga kedepan lebih baik lagi bisa turun ke zona kuning atau bahkan hijau. Kami ingin mengawal pilkada ini aman sesuai protokol kesehatan. Dan terus bermusyawarah dan berkoordinasi dalam satgas covid dan pokja covid bersama Bawaslu. Untuk melakukan antisipasi agar pilkada aman dan terkendali.

7. Wakapolrestabes Makassar AKBP Asep Marsel Suherman, SIK

Situasi pilkada makassar, perlu kami laporkan pilkada yang sedang berjalan baik. Kami mendapatkan tugas tidak hanya mengamankan pilkada Kota Makassar tapi seluruh daerah yang melaksanakan pilkada menjadi tanggungjawab, Polres-polres tersebut dibawah pantauan kami. Seperti debat kandidat, kemarin debat kandidat Kab Luwu Utara kami alhamdulillah dapat menyelesaikan persoalan ketika debat tersebut dan dapat diselesaikan. Ke depan KPU harus lebih tegas lagi, karena yang kita hadapi bukan hanya gangguan kamtibmas tapi juga pandemi covid 19.

Yang terjadi kemarin dalam debat, karena KPU kurang tegas menyampaikan hal-hal yang penting kepada para kandidat. Sehingga para paslon membawa massanya dari kampung. Sehingga terjadi gesekan. Kejadian tersebut perlu kami laporkan ke Komisi II DPR RI sebagai masukan.

Kami laporkan, pengamanan kota Makassar telah melibatkan personil dari Polrestabes sendiri, Brimob Polda, ditsatbara polda. Pola pengaman yang kami terapkan, pola aman, pola rawan, dan pola sangat rawan, dan tps khusus di rutan dan lapas. Yang pasti Polrestabes Makassar bersama dengan TNI dan stakeholder lain menyatakan terima kasih atas segala kerjasamanya. Terutama KPU yang kemarin telah melakukan simulasi sehingga pilkada bisa berjalan lancar.

8. Staf ahli Mendagri Bidang Hukum Drs. Lutfi TMA, MSi

Kami meminta KPU provinsi dan kab/kota. Untuk menjadikan protokol covid 19 sebagai pedoman utama. Karena pemerintah telah memberikan tambahan anggaran untuk penyelenggara pilkada. Tambahan tersebut memiliki makna bahwa pilkada harus aman dari covid 19. Bila pesta demokrasi besok aman, maka akan menjadi prestasi bagi kita dalam penanganan covid.



Terkait surat suara, memang UU mengamankan tambahan 2,5% surat suara dari DPT yang telah disepakati. Karena UU tidak bisa memberikan suara tambahan berdasarkan proyeksi.

Kami memahami pada saat cokolit banyak warga Kota Makassar yang pulang kampung seperti mahasiswa, pekerja yang di PHK jadi itulah kondisi-kondisi kekhawatiran KPU Makasar bila nanti pada saat hari pemungutan suara mereka datang akan tetapi surat suara tidak cukup. Tapi bagaimanapun pemerintah sampai saat ini masih berpatokan pada UU yang ada, maka pemerintah melihat jumlah surat suara yang dapat didistribusi hanya sesuai dengan DPT ditambah suara tambahan sebanyak 2,5% dari DPT.

Mungkin nanti kita masalah tersebut dapat dibicarakan bersama antara pemerintah dan DPR untuk mencari solusi hal-hal tersebut.

Kami minta bantuan kepada seluruh penyelenggara pilkada agar pilkada serentak dapat aman dari covid. 19.

## **B. Pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI**

### **1. Komarudin Watubun, SH**

Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pak walikota, para penyelenggara pilkada atas tahapan yang telah berlangsung. Terkait masalah DPT, masalah orang meninggal masih masuk dalam DPT itu memang menjadi masalah. Ketika kami ke Bali hal tersebut juga terjadi. Dan alhamdulillah dari laporan KPU Makasar hal tersebut tidak terjadi, maka hal ini merupakan sebuah kemajuan. Di Bali orang meninggal masih banyak masuk dalam DPT. Yang perlu diantisipasi adalah hari pemungutan. Karena seluruh kerja keras kita nanti akan ditentukan pada hari itu. Disitu akan menentukan sukses tidaknya pilkada. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu perlu kerja keras pada hari itu.

Ketika pencoblosan pada pemilu yang lalu penyelesaian sampai dengan malam hari. Tentu ini perlu diperhatikan meski besok bukan pilkada bukan pemilu. Untuk KPU tentu punya cara agar tahapan pemungutan suara berlangsung baik dan sukses.

Kemudian ketegasan dari Gakumdu juga penting, saya lihat pemilu dan pilkada-pilkada urusan penegakkan hukum kadang diabaikan. Dan untuk itu, Polri untuk penempatan anggota Polri saya minta orangnya yang profesional. Kadang saya lihat hanya memenuhi syarat saja. Sehingga laporan dari pihak KPU kadang kurang profesional. Karena kita tahu jatuh bangunnya sebuah negara dalam era demokrasi adalah dari pemilu. Karena ingin demokrasi yang berkualitas.

Dalam suasana covid 19 ini, kalau kita dapat melaksanakan pilkada ini sukses maka itu menjadi prestasi kita dalam pergaulan dunia.

### **2. H. Sukanto, SH**

Agar KPU dapat menuntaskan perekrutan KPPS. Dalam suasana pandemic covid perekrutan tersebut perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu adhoc dapat dilengkapi. Jangan sampai ini tidak terpenuhinya KPPS akan menjadi cacatnya pilkada.

### 3. Dr. H. Syamsurizal, SE, MM

Kami memberikan apresiasi kepada penyelenggara pilkada dan forkompinda. Hanya kami minta netralitas ASN dalam pilkada. Karena Presiden mengharapkan ASN kita menjadi PNS kelas dunia. Maka netralitas ASN adalah sebuah keharusan menuju ASN yang professional.

### C. Foto Kegiatan



### III. PENUTUP

Dalam Kunjungan Spesifik Pilkada di Kota Makassar, Ketua Tim H. Arwani Thomafi meminta agar seluruh mitra Komisi II DPR RI agar mempersiapkan Pilkada secara baik termasuk dalam penanganan protokol kesehatan sehingga pilkada serentak 9 Desember 2020 berlangsung dengan aman dan sukses.. Dengan demikian, pilkada yang berkualitas diharapkan menghasilkan kepemimpinan daerah yang kuat dan profesional, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan sekaligus mendorong pembangunan nasional.

**KOMISI II DPR RI  
KETUA TIM KUNSPEK**

**H. Moh. Arwani Thomafi**

## LAMPIRAN

### 1. Jawaban Tertulis KPU Kota Makassar

Terkait dengan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi II DPR RI ingin mendapatkan penjelasan tertulis terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Persiapan dan tindak lanjut KPU Kota Makassar terkait Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terutama menyangkut beberapa hal,yaitu:
  - a. Pelarangan pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, danlain-lain?
  - b. Pelaksanaan kewajiban dalam penggunaan masker, *handsanitizer*, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai mediakampanye?
    - Terkait dengan persiapan dan tindak lanjut dari pilkada serentak dalam kondisi pandemi, telah dilakukan koordinasi ke beberapa pihak. Misalnya dengan pasangan calon, KPU Kota Makassar telah menjelaskan bahwa terkait dengan pandemi seperti ini, pertemuan tatap muka sangat dibatasi, kalaupun ada maka harus dilakukan sangat ketat, terbatas dan menjalankan protokol kesehatan. KPU Kota Makassar telah melakukan diskusi dengan pasangan calon lewat liasion officer untuk menerapkan dana kampanye yang berbasis pada protokol kesehatan dan semua pasangan calon sepakat untuk itu, sehingga dana kampanye yang disepakati memasukan beberapa item-item APD agar kampanye berjalan dengan aman karena berbasis pada protokol kesehatan
    - Media kampanye juga sejauh ini telah dilakukan oleh pasangan calon tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan, himbauan juga datang dari aparat penegak hukum. KPU Kota Makassar melakukan hal yang sama yaitu terus melakukan sosialisasi baik langsung, via daring, maupun lewat alat peraga lain baik fisik mupun elektronik tentang keberlangsungan pilkada yang sehat dan aman dengan mematuhi protokol kesehatan
2. Apa saja bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19? Apakah KPU Kota Makassar mendorong sosialisasi melalui media daring?
  - KPU Kota Makassar selalu melakukan sosialisasi via daring akan pentingnya menaati protokol kesehatan, hal ini telah disampaikan kepada masyarakat luas maupun pada pasangan calon yang akan melaksanakan

kampanye. Sosialisasi juga dikemas dalam bentuk yang lebih kreatif, memanfaatkan seluruh kanal maupun dokumentasi, baik melalui gambar, maupun video (baik yang berdurasi pendek maupun panjang). Setiap rapat yang dilakukan secara daring via aplikasi zoom maupun lainnya terus diingatkan pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan

3. Bagaimana penerapan protokol kesehatan covid-19 dalam semua tahapan pilkada 2020 yang telah dan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar, terutama pada tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, antarlain:

- a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon
- b. Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon
- c. Tahapan Pengundian Nomor Urut
- d. Tahapan Kampanye
- e. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- f. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil

- Terkait dengan penetapan pasangan calon, KPU Kota Makassar telah melaksanakan protokol kesehatan secara baik, seperti tidak membiarkan kerumunan saat penetapan pasangan calon di Kantor KPU Kota Makassar, sekaligus membatasi tim sukses pasangan calon untuk masuk menemani pasangan calon saat pendaftaran di Kantor KPU Kota Makassar, tiap pasangan calon juga sebelum masuk mendaftar di Kantor KPU Kota Makassar, terlebih dahulu diberikan hand sinitizer, sekaligus untuk barang bawaan diberikan cairan disinfektant, semua yang berada di Kantor KPU Kota Makassar diwajibkan untuk mengenakan masker dan terus diingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan
- Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon, KPU Kota Makassar belum ada sengketa calon
- Tahapan Pengundian Nomor Urut, KPU Kota Makassar melakukan pengundian nomor urut di Hotel Harper dengan melaksanakan protokol kesehatan, hampir seperti yang dilakukan saat pendaftaran pasangan calon di Kantor KPU Kota Makassar. Pada proses ini justru lebih mudah dilakukan karena beberapa perlengkapan agar protokol kesehatan berjalan dengan baik disediakan oleh pihak hotel. Dan pihak hotel dan pihak keamanan juga selalu mengingatkan agar protokol kesehatan dipatuhi.
- Tahapan Kampanye, KPU Kota Makassar terus melakukan koordinasi terus menerus baik dengan pihak keamanan (TNI/Polri) maupun Bawaslu untuk selalu mengingatkan pentingnya protokol kesehatan saat kampanye. Dibeberapa rapat koordinasi yang dilakukan juga selalu menyinggung soal protokol kesehatan, juga dalam rapat-rapat dengan pasangan calon. Pasangan calon, KPU Kota Makassar, maupun Bawaslu Kota Makassar telah bersama-sama mengikuti .

## **2. Jawaban Tertulis Bawaslu Kota Makassar**

Bahwa sehubungan dengan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, serta adanya daftar pertanyaan, maka dengan ini Bawaslu Kota Makassar menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana persiapan dan tindak lanjut Bawaslu Kota Makassar terkait pengawasan penerapan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terutama menyangkut beberapa hal, yaitu:
  - a. Pelarangan pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain?
  - b. Pelaksanaan kewajiban dalam penggunaan masker, *handsanitizer*, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye?

Jawaban:

- Bahwa persiapan terkait pengawasan penerapan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar beserta jajarannya mulai dari Panwaslu Kecamatan dan PKD, awalnya adalah mengeluarkan Surat Himbuan kepada semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota serta juga ditujukan kepada Partai Pengusung maupun pendukung Pasangan Calon beserta Tim Kampanyenya untuk tetap menaati protokol kesehatan dalam kampanye serta menghimbau agar tidak melaksanakan pertemuan yang melibatkan massa yang banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain;
  - Bahwa dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kampanye yang melanggar protokol kesehatan, maka Bawaslu beserta jajarannya melakukan upaya peneguran lisan. Apabila tidak diindahkan akan dilakukan teguran secara tertulis.
3. Bagaimana persiapan dan langkah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar terhadap penerapan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease (COVID-19)?

Jawaban:

- pelaksanaan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease (COVID-19), dilaksanakan dengan tetap menaati protokol Kesehatan. Misalnya pelaporan pelanggaran sudah bisa dilakukan melalui online. Pelaksanaan klarifikasi juga dilaksanakan via daring. Saat pelaksanaan pengawasn, dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol Kesehatan.

4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar pada tahapan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang sedang berjalan, baik kampanye secara tatap muka maupun kampanye melalui media daring? Apabila terjadi pelanggaran selama masa kampanye secara tatap muka maupun kampanye melalui media daring, bagaimana tindak lanjut Bawaslu Kota Makassar?

Jawaban:

- Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar pada tahapan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 yang sedang berjalan, baik kampanye secara tatap muka maupun kampanye melalui media daring, dilakukan juga melalui pengawasan langsung di lapangan maupun pengawasan tidak langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Apabila ada indikasi pelanggaran terhadap aturan mengenai kampanye, maka pertama akan dilakukan penelusuran untuk membuat terang suatu peristiwa serta mengumpulkan bukti-bukti. Apabila terdapat bukti yang mengarah pada adanya dugaan pelanggaran kampanye, maka peristiwa tersebut akan dijadikan temuan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran. Apabila memenuhi kualifikasi sebagai dugaan tindak pidana pemilihan, maka ditindaklanjuti melalui Gakkumdu.
5. Dalam rangka penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 selama tahapan penyelenggaraan pilkada 2020, Bagaimana pelaksanaan koordinasi Bawaslu Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Gugus Tugas Covid-19, TNI, dan Polri dalam penanganan pilkada serentak lanjutan 2020 sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti:
- a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon
  - b. Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon
  - c. Tahapan Pengundian Nomor Urut
  - d. Tahapan Kampanye
  - e. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
  - f. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil

Jawaban:

- Bahwa dalam rangka penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 selama tahapan penyelenggaraan pilkada 2020, Bawaslu Kota Makassar telah melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kota Makassar, Gugus Tugas Covid-19, TNI, Polri dan KPU Kota Makassar serta telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Protokol Kesehatan Covid 19.
6. Bagaimanakah kesiapan Bawaslu Kota Makassar dan seluruh jajaran terkait penyampaian laporan hasil pengawasan pada masing-masing tahapan melalui sistem online? Apa saja hal-hal yang memerlukan perhatian khusus?

Jawaban:

- Saat ini Bawaslu Kota Makassar telah mempunyai system pelaporan hasil pengawasan melalui aplikasi bernama “ Awas App” . Mulai dari Panwaslu Kecamatan sampai kepada PKD diharuskan melaporkan semua hasil pengawasannya melalui pengisian data di Aplikasi tersebut.

7. Bagaimana hasil pemetaan Bawaslu Kota Makassar terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kota Makassar? Apa saja strategi untuk mengatasi potensi permasalahan tersebut? Sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar hingga saat ini dengan instansi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu?

Jawaban:

- Potensi kerawanan terjadi saat pelaksanaan kampanye yang melanggar protokol Kesehatan, juga mengenai kampanye yang dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun strategi untuk mengatasi persoalan tersebut tentunya dengan melakukan serangkaian himbauan kepada Pasangan Calon, melakukan penindakan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang dilarang dalam kampanye. Juga melakukan Pendidikan politik kepada warga untuk bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Selain itu, koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu juga dilakukan secara berkala untuk menyatukan pemahaman dan strategi bersama.

8. Berkaca pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 yang lalu, Apa saja hal-hal yang menurut Bawaslu Kota Makassar perlu mendapat perhatian khusus, agar pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berjalan aman, lancar, dan demokratis?

Jawaban:

- Bahwa agar pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berjalan aman, lancar, dan demokratis, diperlukan peran semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban bersama.

Apakah ada permasalahan dalam penerapan protokol kesehatan covid-19 tersebut?

4. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid 19, bagaimana implementasi penegakan disiplin dan sanksi hukum dalam semua tahapan Pilkada 2020 oleh KPU Kota Makassar yang sesuai dengan beberapa peraturan berikut:
  - UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat(3).
  - UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya Pasal 14 ayat(1).
  - UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93 dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218.
5. Bagaimana penerapan koordinasi KPU Kota Makassar dengan Bawaslu, pemerintah daerah, gugus tugas covid-19, Polri, dan aparat terkait lainnya dalam pelaksanaan pilkada serentak lanjutan 2020 sesuai dengan protokol kesehatan covid-19?
  - Koordinasi terus dilakukan antara Bawaslu, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, TNI/Polri, penyelenggara ad hoc, maupun pasangan calon. Hal ini terus dilakukan dan semakin intens disaat tahapan yang telah mendekati hari pemungutan suara. Baik via daring, rapat terbatas dengan melaksanakan protokol kesehatan, maupun monitoring
6. Sejauh mana pemutakhiran data dan daftar pemilih yang telah dilaksanakan, dan bagaimana KPU Kota Makassar memastikan pemilih pemula terdata dalam daftar pemilih (termasuk pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el)?
  7. Bagaimana pantauan dan evaluasi KPU Kota Makassar terhadap pelaksanaan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang sedang berjalan? Apakah KPU Kota Makassar mendorong calon Walikota dan Wakil Walikota agar kampanye melalui mediadaring?
    - KPU Kota Makassar mendorong untuk kampanye daring, dan terkait ketaatan dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kampanye, pembatasan jumlah dan adanya item item protokol kesehatan (APD dan lainnya) selama masa kampanye selalu diingatkan kepada pasangan calon
  8. Apakah KPU Kota Makassar melaksanakan pengaturan dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara pilkada lanjutan 2020 menyangkut:
    - a. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap covid-19?
    - b. Bagaimana kesiapan KPU Kota Makassar pada tahap rekapitulasi hasil



pemungutan suara melalui e-rekap, baik kesiapan infrastruktur maupun sumberdaya manusia?

9. Berkaca pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 yang lalu, apa saja hal-hal yang menurut KPU Kota Makassar perlu mendapat perhatian khusus, agar pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berjalan aman, lancar, dan demokratis?
  - Perlu menjadi perhatian khusus adalah netralitas, transparansi, dan kepatuhan protokol kesehatan bagi penyelenggara maupun antar pasangan calon, untuk saat ini KPU Kota Makassar paling tidak menghadapi hal-hal seperti soal keamanan maupun kesehatan. KPU Kota Makassar juga tengah berupaya agar semua masyarakat terpenuhi hak politiknya di tengah pandemi. Olehnya itu, protokol kesehatan menjadi penting.

-----